



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK
KOMISI VI DPR RI
KE KABUPATEN PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR
PADA MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2023-2024
TANGGAL 28 – 30 AGUSTUS 2023**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

2023



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI VI DPR RI
PENINJAUAN TOL PROBOLINGGO-BANYUWANGI (PROBOWANGI)
KE KABUPATEN PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR
PADA MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2023-2024
TANGGAL 28 – 30 AGUSTUS 2023**

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Kunjungan Kerja

Pasal 67 dan 30 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3), sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MD3, diatur bahwa DPR RI memiliki 3 (tiga) fungsi, yakni Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan. Untuk menjalankan ketiga fungsi tersebut, dapat dilaksanakan melalui pelaksanaan kunjungan kerja, baik di dalam maupun ke luar negeri, sebagaimana diatur dalam Pasal 98 UU MD3.

Pelaksanaan Kunjungan Kerja Spesifik ke PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Waskita Karya Toll Road dan PT Brantas Abipraya (Persero) di Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur didasarkan pada aturan pada Undang-Undang tersebut. Selain itu, pelaksanaan kunjungan ini juga didasarkan pada Keputusan Pimpinan DPR RI tentang Penugasan Anggota Komisi I s.d. XI DPR RI untuk melakukan Kunjungan Kerja pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023 – 2024, dan Keputusan Rapat Internal Komisi VI DPR RI mengenai Sasaran dan Objek

Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI dalam Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023 – 2024.

B. Objek Kunjungan Kerja.

Objek kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI adalah PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Waskita Karya Toll Road dan PT Brantas Abipraya (Persero) di Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur yang merupakan BUMN yang bergerak di sektor Infrastruktur, Utilitas Transportasi dan konstruksi.

C. Maksud dan Tujuan Kunjungan Kerja

Kunjungan kerja spesifik ini memiliki beberapa maksud dan tujuan antara lain sebagai berikut :

1. Mengetahui update terakhir penyelesaian Proyek Strategis Nasional oleh Perusahaan.
2. Menggali permasalahan kendala utama yang dihadapi Perusahaan dalam menyelesaikan proyek Jalan Tol Trans Jawa Probolinggo-Banyuwangi.
3. Mendapatkan strategi untuk mengatasi permasalahan dalam penyelesaian proyek jalan tol Probolinggo-Banyuwangi agar tepat waktu.

D. Agenda Kunjungan Kerja

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur ini dilaksanakan dengan agenda pertemuan dengan Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Direktur Utama PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Direktur Pengendalian dan K3LMP PT Waskita Karya Toll Road dan Direktur Utama PT Brantas Abipraya (Persero).

E. Anggota Tim Kunjungan Kerja

Anggota Tim dalam pelaksanaan kegiatan Kunker Spesifik Komisi VI DPR RI ke Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

NO.	NO. ANGG.	N A M A	KETERANGAN
1.	A-318	M. SARMUJI, S.E., M.Si	PIMP. / F-PGOLKAR
2.	A-33	FAISOL RIZA, S.S	PIMP. / F-PKB
3.	A-209	SONNY T. DANAPARAMITA	F.PDIP
4.	A-158	SONDANG TIAR DEBORA TAMPUBOLON	F.PDIP
5.	A-305	H. SINGGIH JANURATMOKO, S.K.H., M.M.	F.PG
6.	A-131	Ir. H. LA TINRO LA TUNRUNG	F.PGERINDRA
7.	A-115	KHILMI	F.PGERINDRA
8.	A-374	H. SUBARDI, S.H., M.H.	F NASDEM
9.	A-36	Ir. H. M. NASIM KHAN	F.PKB
10.	A-40	H. ALI AHMAD	F.PKB
11.	A-563	PUTU SUPADMA RUDANA	F.PD
12.	A-447	AMIN A.K., M.M.	F.PKS
13.	A-493	EKO HENDRO PURNOMO, S. Sos.	F.PAN
14.	A-499	Hj. INTAN FAUZI, S.H., LL.M.	F.PAN
15.	A-472	H. ACH. BAIDOWI, S.Sos., M.Si.	F.PPP

F. HASIL KUNJUNGAN

Hasil Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

A. PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

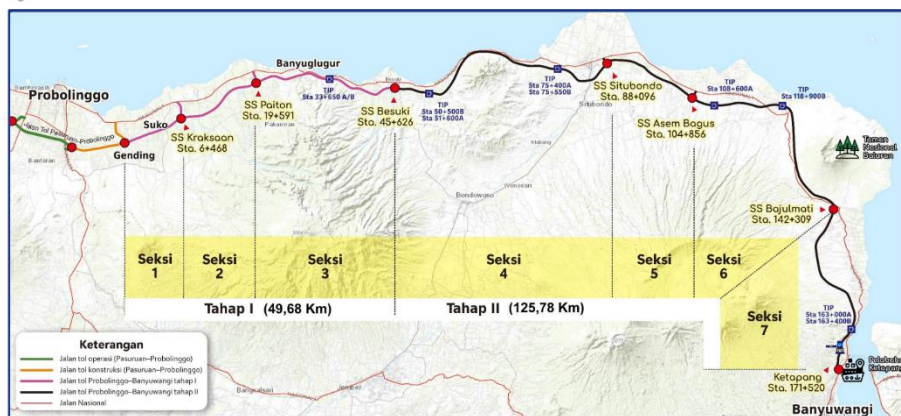
Jasa Marga memiliki 36 konsesi jalan tol yang dioperasikan baik di level induk, anak perusahaan, dan di bawah subholding PT Jasamarga Transjawa Tol. Perusahaan memiliki 3 Anak Perusahaan yang berfokus pada bisnis pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol serta 1 Anak Perusahaan di bisnis prospektif.

Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi merupakan salah satu proyek strategis nasional yang dikelola oleh PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi selaku Badan Usaha Jalan Tol yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Jasa Marga sebesar 94,93%, PT Brantas Abipraya (Persero) sebesar 5,00% dan PT Waskita Toll Road sebesar 0,07%. Jalan Tol

Probolinggo-Banyuwangi merupakan ruas pamungkas dari jaringan Jalan Tol Trans-Jawa yang menghubungkan ujung barat hingga ujung timur pulau Jawa untuk meningkatkan konektivitas serta mempermudah mobilitas orang, barang dan jasa. Sesuai dengan Permenko Perekonomian No. 9 Tahun 2022, pembebasan lahan dan pembangunan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi difokuskan pada ruas Probolinggo-Besuki dengan hak konsesi selama 50 tahun dan investasi sebesar Rp 10,8 triliun.



Gambar 1.1 Lokasi Proyek Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi



Gambar 1.2 Lokasi Proyek Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi

PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi (Tahap 1 : Gending – Besuki) Hak Pengusahaan Dan Data Investasi (sesuai BA Rencana Usaha) Pemegang Saham PT Jasa Marga (Persero) Tbk. PT Brantas Abipraya (Persero) PT Waskita Toll Road 94,93% 5,00% 0,07%. Panjang 49.88 km, Biaya Investasi Rp. 10,8 T, Volume lalu lintas Gol. I 14.097 kendaraan/hari (tahun 2024), Tarif tol awal Gol I Rp. 1.540/km, Masa Konsesi 50 tahun dan Sistem Operasi Tertutup DATA TEKNIS (*sesuai

hasil Asistensi dengan BPJT). Kecepatan Rencana 100 Km/jam (Sta. 0+000 – Sta. 25+200) 80 Km/jam (Sta. 25+200 – Sta. 46+100, Simpang Susun 3 buah, Jembatan / Bridge 30 Buah, Overpass 1 Buah, Box Underpass 69 Buah dan Perkerasan Main Road Perkerasan Kaku.

Keputusan Direktur Utama Lembaga Manajemen Aset Negara nomor 35/LMAN/2023 tanggal 22 Juni 2023 Tentang Daftar Prioritas Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Proyek Strategis Nasional oleh Lembaga Manajemen Aset Negara Tahun 2023 (terdapat tambahan sebesar Rp.150 Milyar).

Hal-hal yang Perlu Ditindaklanjuti pada Proyek Jalan Tol Probolinggo–Banyuwangi;

- Kurangnya Alokasi Pendanaan Tanah; Berdasarkan alokasi LMAN s/d TA 2023, total alokasi anggaran JPB adalah senilai Rp 1.664,52 M, telah direalisasikan senilai Rp 1.499,02 M, sehingga sisa alokasi yang dapat digunakan senilai Rp 165,49 M. Dengan kebutuhan anggaran untuk ruas Suko – SS Besuki senilai 1.770,15 M, maka masih dibutuhkan dana senilai Rp.105,64 M yang belum dialokasikan.

Dengan melakukan rencana tindak lanjut JPB akan melaksanakan optimasi penyerapan sisa anggaran pengadaan tanah sebagai dasar permintaan anggaran tambahan serta berkoordinasi dengan pihak terkait (Bina Marga, KPPIP, dan LMAN) terkait penambahan anggaran tahun 2023 untuk mencapai target tanah bebas di pelaksanaan konstruksi.

- RTA masih dalam proses pengesahan di Kementerian PUPR; Telah dilaksanakan Rapat Pleno Pada Bulan Juni 2023 dan Berita Acara RTA Paket 1 (STA 0+000 s/d 46+100) telah ditandatangani dan dilanjutkan dengan proses pengesahan dari Dirjen BM.

Dengan melaksanakan rencana tindak lanjut Koordinasi dengan Kementerian PUPR terkait pengesahan RTA.

- Belum mencukupinya jumlah Quarry timbunan yg memiliki izin penambangan IUP Operasi, untuk penyelesaian pembangunan jalan tol; Terbatasnya Quarry Timbunan yang memiliki izin dan memenuhi spesifikasi, sehingga pelaksanaan pekerjaan tanah di lapangan

terhambat, Perijinan masih di proses oleh Dinas ESDM Prov Jawa Timur dan Sudah dilakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur (Wakil Gubernur dan Kepala Dinas ESDM) dan KPPIP.

Rencana dengan tindak lanjut Koordinasi dengan Pihak Instansi terkait dan Kontraktor.

- Belum diperolehnya Perijinan Jalan Akses ke Lokasi pekerjaan di Wilayah Perhutan; Perijinan masih diproses oleh penyedia Jasa dengan instansi / pihak terkait. Rencana dengan tindak lanjut dengan melakukan Koordinasi dengan Pihak Instansi terkait dan Kontraktor.
- Rekomtek PUSDA dan BBWS Provinsi Jawa Timur; Izin Rekomtek Bangunan Persilangan Sungai/Saluran/Drainase saat ini sedang dalam tahap proses pengajuan. Surat Pengajuan Izin Rekomtek BBWS dan PUSDA telah diajukan pada tanggal 12 Juni 2023 (Paket 1 dan Paket 2). • Sudah dilakukan joint survey dengan BBWS pada tanggal 12 Juli 2023 yang akan ditindaklanjuti dengan Rapat Pembahasan. • PT JPB telah menyampaikan ke Direktur Jenderal Bina Marga terkait permohonan perubahan Pemohon Izin Penggunaan Aset/Tanahpada tanggal 14 Agustus 2023 melalui surat Nomor: DU.PR.01.02.301.

Dengan Rencana dengan tindak lanjut Koordinasi dengan PUSDA dan BBWS Provinsi Jawa Timur.

- Masih cukup banyak tanah yang belum bebas; Paket 2 lahan bebas sebesar 90,87% dan tersebar sehingga kurang optimal dalam pelaksanaan konstruksi; b. Paket 3 lahan bebas sebesar 88,77% dan tersebar sehingga kurang optimal dalam pelaksanaan konstruksi.

Dengan Rencana dengan tindak lanjut Koordinasi dengan Pihak Instansi terkait.

B. PT Transjawa Paspro Jalan Tol

Tol Pasuruan-Probolinggo merupakan proyek pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang 'tergadai' selama 50 tahun.

Jalan Tol Pasuruan – Probolinggo yang merupakan bagian dari proyek Jalan Tol Trans Jawa ini akan dikelola oleh TPJT sepanjang 43.75 Kilometer yang akan mendekatkan jarak tempuh dari Pasuruan hingga Gending.



Gambar 2. Trase Pembangunan Jalan Tol Pasuruan – Probolinggo Seksi 4a

Tol ini dipegang konsesinya oleh PT Trans Jawa Paspro Jalan Tol (TPJT) selama 50 tahun sejak tahun 2017 lalu hingga tahun 2067 mendatang.

Sistem Pengoperasian Jalan Tol Pasuruan – Probolinggo Sistem Operasi Tertutup (Tol Trans-Jawa Cluster 4).

Ruas Jalan Tol Pasuruan – Probolinggo masuk dalam Proyek Tol Trans-Jawa, terintegrasi dengan Cluster 4 dengan ruas lain sebagai berikut:

- Porong Gempol (PT Jasamarga TransJawa Tol) - Tol Trans Jawa.
- Gempol Pasuruan (PT Jasamarga Gempol Pasuruan) - Tol Trans Jawa.
- Pasuruan Probolinggo (PT Trans-Jawa Paspro Jalan Tol) - Tol Trans Jawa.
- Gempol Pandaan (PT Jasamarga Gempol Pandaan).
- Pandaan Malang (PT Jasamarga Pandaan Malang).

Jalan Tol Pasuruan-Probolinggo Seksi 4A dioperasikan secara fungsional selama 19 hari (17 Agustus – 4 September 2023) dalam rangka HUT ke-78 RI. SK Tarif Telah mendapatkan rekomendasi dari DJPI KemenPUPR, saat ini sedang dalam proses pengusulan tarif dari BPJT ke Menteri PUPR.

G. REKOMENDASI

Dari pertemuan yang dilakukan Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Direktur Utama PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Direktur Pengendalian dan K3LMP PT Waskita Karya Toll Road dan Direktur Utama PT Brantas Abipraya (Persero) di Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur, pada saat pelaksanaan kunjungan kerja spesifik, ada beberapa rekomendasi antara lain adalah sebagai berikut:

1. Komisi VI DPR RI meminta kepada Menteri BUMN RI dengan penugasan pemerintah kepada BUMN Karya sektor Infrastruktur, Utilitas Transportasi dan konstruksi untuk diperhatikan atas beban-beban yang diberikan dalam penyelesaian Proyek Strategis Nasional walaupun diberikan harus diperhatikan dengan memberikan penambahan Penyertaan Modal Negara kepada BUMN-BUMN yang diberikan penugasan.
2. Komisi VI DPR RI meminta kepada PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Waskita Karya Toll Road dan PT Brantas Abipraya (Persero) untuk segera bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada dengan melakukan koordinasi kepada kementerian dan pihak-pihak terkait dalam menyelesaikan Proyek Strategis Nasional ini.
3. Komisi VI DPR RI meminta kepada PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Waskita Karya Toll Road dan PT Brantas Abipraya (Persero) untuk melakukan kajian yang lebih mendalam lagi dalam menerima penugasan-penugasan yang diberikan pemerintah untuk keberlangsungan Perusahaan yang lebih maju dan bisa lebih banyak lagi memberikan dividen kepada negara.

**KETUA TIM KUNKER SPESIFIK KOMISI VI DPR RI
KE KABUPATEN PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR**

TTD.

**M. SARMUJI, S.E., M.Si.
A – 318**

H. DOKUMENTASI KEGIATAN



